

BAB I

PENDAHULAN

1.1.Latar Lelakang Masalah

Pendidikan nasional dewasa ini menurut Tilaar (1994) sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok sistem pendidikan nasional : (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (4) status kelembagaan, (5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (6) sumber daya yang belum professional.

Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dalam hal ini, perlu adanya perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. Pendidikan merupakan kehidupan, untuk itu kegiatan belajar - mengajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill* atau *life competency*) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Sebagaimana dikemukakan oleh Unesco (1994) ada prinsip yang sangat relevan dengan Pancasila, yaitu pendidikan harus diletakkan pada empat pilar, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live*

together), dan belajar menjadi diri sendiri (*life long learning*). Kultur yang demikian harus dikembangkan dalam pembangunan manusia, karena pada akhirnya aspek kultural dari kehidupan manusia lebih penting dari pertumbuhan ekonomi.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Hal ini lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini Mendiknas juga mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002. Akan tetapi berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup mengembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami perubahan secara merata (Depdiknas, 2001).

Ketiga faktor itu adalah pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara *birokratik-sentralistik*. Dan ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*). Di antara upaya tersebut, antara lain dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Bila sebelumnya pengelolaan pendidikan merupakan wewenang pusat, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangannya berada pada pemerintah daerah kota / kabupaten. Dalam kaitan ini visi, misi strategi Kantor Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat kota / kabupaten harus dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata organisasi maupun lingkungannya, dan harus mendukung pula misi pendidikan nasional, serta harus mampu memelihara garis tujuan yang layak, dapat dicapai dengan kemampuan yang ada serta memiliki wawasan tentang gambaran ideal kondisi pendidikan yang diharapkan di masa depan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Indra Djati Sidi (2000) bahwa ada empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar

... pendidikan nasional yang diwujudkan oleh berbagai pihak sudah

tidak efektif, dan tidak mampu lagi memberikan bekal, serta tidak dapat mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Perubahan mendasar tersebut berkaitan dengan kurikulum, yang dengan sendirinya menuntut dan mensyaratkan berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain.

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis tingkat satuan pendidikan, yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman dan tuntutan reformasi, guna menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Kurikulum berbasis tingkat satuan pendidikan diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif, efisien dan berhasil guna.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang disingkat KTSP yang telah diberlakukan Depertemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Artinya, kurikulum baru yang ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa. Menurut Fasli Jalal (2006), pemberlakuan KTSP tidak akan melalui uji publik maupun uji coba,

Kompetensi (KBK) yang diterapkan ke beberapa sekolah yang menjadi *pilot project*. Fasli Jalal juga berpendapat bahwa pemberlakuan Kurikulum 2006 tergantung analisis Mendiknas. Namun, kurikulum ini hanya akan diterapkan di kelas 1 di semua jenjang. Selain itu, hanya sekolah yang siap, yang menerapkan kurikulum baru ini. Kesiapan sekolah ini ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, pengalaman menerapkan KBK, dan rasio murid. Pengalaman menerapkan KBK dapat menjadi bekal suatu sekolah untuk menerapkan kurikulum baru ini dan diharapkan tahun 2009, semua sekolah telah menerapkan kurikulum ini.

1.1.1.Kelebihan KTSP.

Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihan masing-masing bergantung kepada situasi dan kondisi saat di mana kurikulum tersebut diberlakukan. Menurut Imam Hanafie (2007) KTSP yang direncanakan dapat diberlakukan secara menyeluruh di semua sekolah di Indonesia pada tahun 2009 itu juga memiliki beberapa kelebihan jika dibanding dengan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 2004 atau KBK. Kelebihan-kelebihan KTSP ini adalah sebagai berikut:

1.1.1.1.Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh

... ..

menghargai potensi keunggulan lokal. Dengan adanya penyeragaman ini, sekolah di kota sama dengan sekolah di daerah pinggiran maupun di daerah pedesaan. Penyeragaman kurikulum ini juga berimplikasi pada beberapa kenyataan bahwa sekolah di daerah pertanian sama dengan sekolah yang daerah pesisir pantai, sekolah di daerah industri sama dengan di wilayah pariwisata. Oleh karenanya, kurikulum tersebut menjadi kurang operasional, sehingga tidak memberikan kompetensi yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dan keunggulan khas yang ada di daerahnya. Sebagai implikasi dari penyeragaman ini akibatnya para lulusan tidak memiliki daya kompetitif di dunia kerja dan berimplikasi pula terhadap meningkatnya angka pengangguran. Untuk itulah kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkrit terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia.

Dengan semangat otonomi itu, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi lingkungan sekolah.

1.1.1.2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan.

Dengan berpijak pada panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang dibuat oleh BNSP, sekolah diberi keleluasaan untuk

sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Sekolah bisa mengembangkan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan.

1.1.1.3.KTSP Sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa.

Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sekolah diwajibkan menyusun kurikulumnya sendiri. KTSP itu memungkinkan sekolah menitikberatkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. KTSP ini sesungguhnya lebih mudah, karena guru diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensi siswanya sesuai dengan lingkungan dan kultur daerahnya. KTSP juga tidak mengatur secara rinci kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas, tetapi guru dan sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkannya sendiri sesuai dengan kondisi murid dan daerahnya.

1.1.1.4.KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%.

Dengan diberlakukannya KTSP itu dapat mengurangi beban belajar sebanyak 20% karena KTSP tersebut lebih sederhana. Kehadiran KTSP ini bisa jadi merupakan kabar baik bagi sekolah-sekolah plus. Sebagian sekolah-sekolah

plus tersebut ada yang khawatir ditegur karena memakai *bilingual* atau memakai istilah kurikulum yang bermacam-macam seperti yang ada sekarang. Sekarang semua bentuk improvisasi dibebaskan asal tidak keluar panduan yang telah ditetapkan dalam KTSP.

1.1.2.Kelemahan KTSP.

Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia di samping memiliki kelebihan-kelebihan juga memiliki kelemahan-kelemahannya. Sebagai konsekuensi logis dari penerapan KTSP ini setidaknya-tidaknya menurut Imam Hanafie (2007) terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam KTSP maupun penerapannya, di antaranya adalah sebagai berikut :

1.1.2.1.Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada.

Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru.

1.1.2.2.Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP.

1.1.2.3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat tercapai secara menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP secara nasional yang targetnya hendak dicapai paling lambat tahun 2009 tidak memungkinkan terlaksana.

1.1.2.4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru. Penerapan KTSP akan menambah persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah berganti kurikulum, KTSP juga mengancam pendapatan para guru. Sebagaimana diketahui rekomendasi BSNP terkait pemberlakuan KTSP tersebut berimplikasi pada pengurangan jumlah jam mengajar. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah jam

profesi dan fungsional. Untuk memperoleh tunjangan profesi dan fungsional semua guru harus mengajar 24 jam, jika jamnya dikurangi maka tidak akan bisa memperoleh tunjangan.

Beberapa faktor kelemahan di atas harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar pemberlakuan KTSP tidak hanya akan menambah daftar persoalan-persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Jika tidak, maka pemberlakuan KTSP hanya akan menambah daftar makin carut marutnya pendidikan di Indonesia(<http://pendidikan.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=25&artid=1>).

Di sisi lain KTSP setidaknya ada tiga bahasa *plesetan*, yaitu : Pertama, KTSP *diplesetkan* sebagai **Kurikulum Tidak Siap Pakai**. *Plesetan* ini mengisyaratkan bahwa para guru –*sebagai "loko" pendidikan*– belum siap menerima perubahan. Para guru tampaknya akan lebih siap apabila semua dokumen kurikulum telah disiapkan dengan rapi dari Jakarta seperti kurikulum sebelumnya. Jadi, bapak-bapak dan Ibu-ibu guru tidak perlu lagi direpotkan menentukan indikator setiap KD, menyusun silabus dan RPP, atau menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), seperti model pendidikan bergaya sentralistis. Semuanya serba disiapkan dari pusat. Kedua, KTSP *diplesetkan* sebagai **Kurikulum Tetap Sama Produknya**. *Plesetan* ini mengisyaratkan bahwa KTSP yang seharusnya mencerminkan karakter siswa didik, latar belakang sosial-budaya masyarakat setempat, dan kondisi sekolah, kenyataannya tak ada bedanya. KTSP antar sekolah, bahkan di seluruh Indonesia sama saja produknya.

Itu hanya kebetulan saja guru melupakan bahwa pada KTSP ini sekolah

tertentu atau model KTSP yang dikeluarkan BSNP. Ketiga, KTSP *diplesetkan* menjadi **Kalau Tidak Siap Pensiun**. Begitu rumitkah KTSP itu sehingga benar-benar membebani guru?

Meski hanya sekadar *plesetan*, idiom-idiom seperti tampaknya mencerminkan masih carut-marutnya dunia pendidikan kita. Perubahan kurikulum sering kali tidak diimbangi dengan persiapan yang matang sehingga membuat kalangan guru kalang kabut. (<http://sawali.info/2007/08/25/tiga-bahasa-plesetan-tentang-ktsp/>)

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji **persepsi** guru-guru SMP Muhammadiyah se Kota Yogyakarta terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengali lebih dalam permasalahan KTSP dengan mengajukan pertanyaan bagaimana persepsi guru – guru SMP Muhammadiyah di Kota Yogyakarta terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan?

1.3.Batasan Penelitian

Pada penelitian akan dikaji persepsi guru terhadap KTSP pada SMP Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Artinya peneliti hanya membatasi diri pada persepsi guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dengan kalimat lain penelitian ini akan membatasi diri pada proses kognitif yang

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui persepsi/pendapat/respon/tanggapan guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada SMP Muhammadiyah di Kota Yogyakarta.
- 1.4.2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut pada SMP Muhammadiyah di kota Yogyakarta

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi sekolah / manajemen sekolah

Dengan mengetahui persepsi guru terhadap KTSP maka diharapkan dapat dijadikan arahan pada manajemen sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMP Muhammadiyah di Kota Yogyakarta agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

1.5.2. Bagi tenaga Pendidik/guru.

Dapat memberikan motivasi kepada para guru/pendidik untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik, karena pada dasarnya salah satu penentu keberhasilan pembelajaran adalah pendidik itu sendiri

1.5.3. Bagi *stakeholder* pendidikan

Keberhasilan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat tergantung pada partisipasi semua *stakeholder* dalam ikut serta mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan